



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 37);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3922 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	10.239.889.614.105,39
b. Pendapatan Transfer	Rp	11.698.786.393.340,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	<u>146.020.494.472,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	22.084.696.501.917,39
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp	3.225.822.553.360,80
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	4.898.722.386.376,95
3) Belanja Hibah	Rp	1.195.068.203.870,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	<u>17.177.100.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp	9.336.790.243.607,75
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp	78.009.159.889,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	1.142.602.008.686,76
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	1.963.235.930.500,64
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	1.612.446.622.172,57
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	41.747.926.804,00
6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	<u>31.967.894.628,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	4.870.009.542.680,97
c. Belanja Tidak Terduga		
- Belanja Tidak Terduga	Rp	64.230.807.314,00
d. Belanja Transfer		
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	4.391.448.912.082,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	<u>1.801.103.645.931,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp	<u>6.192.552.558.013,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	20.463.583.151.615,72
Surplus/(Defisit)		1.621.113.350.301,67
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	976.509.791.198,53
b. Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	976.509.791.198,53
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	2.597.623.141.500,20

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 November 2025


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 53 TAHUN 2025
 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang	
	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	21.221.750.228.801,00	22.084.696.501.917,40	862.946.273.116,39	104,06
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.986.828.256.696,00	10.239.889.614.105,40	253.061.357.409,39	102,53
Pajak Daerah	8.592.000.000.000,00	8.571.499.366.555,80	(20.500.633.444,20)	99,76
Retribusi Daerah	1.019.054.303.810,00	1.100.891.467.508,59	81.837.163.698,59	108,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	258.660.733.379,37	237.697.555.597,37	(20.963.177.782,00)	91,89
Lain-lain PAD yang Sah	117.113.219.506,63	329.801.224.443,63	212.688.004.937,00	281,60
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.986.828.256.696,00	10.239.889.614.105,40	253.061.357.409,39	102,53
PENDAPATAN TRANSFER	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	665.911.959.823,00	106,03
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	665.911.959.823,00	106,03
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	665.911.959.823,00	106,03
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.047.538.588,00	146.020.494.472,00	(56.027.044.116,00)	72,27
Pendapatan Hibah	13.861.535.964,00	22.834.925.000,00	8.973.389.036,00	164,73
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah	188.186.002.624,00	123.185.569.472,00	(65.000.433.152,00)	65,45
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.047.538.588,00	146.020.494.472,00	(56.027.044.116,00)	72,27
JUMLAH PENDAPATAN	21.221.750.228.801,00	22.084.696.501.917,40	862.946.273.116,39	104,06
BELANJA DAERAH	22.198.305.000.000,00	20.463.583.151.615,70	(1.734.721.848.384,28)	92,18
BELANJA OPERASI	10.051.284.787.739,00	9.336.790.243.607,75	(714.494.544.131,25)	92,89
Belanja Pegawai	3.342.133.302.351,00	3.225.822.553.360,80	(116.310.748.990,20)	96,51
Belanja Barang dan Jasa	5.418.607.319.471,00	4.898.722.386.376,95	(519.884.933.094,05)	90,40
Belanja Hibah	1.270.744.165.917,00	1.195.068.203.870,00	(75.675.962.047,00)	94,04
Belanja Bantuan Sosial	19.800.000.000,00	17.177.100.000,00	(2.622.900.000,00)	86,75
JUMLAH BELANJA OPERASI	10.051.284.787.739,00	9.336.790.243.607,75	(714.494.544.131,25)	92,89
BELANJA MODAL	5.286.087.662.209,00	4.870.009.542.680,97	(416.078.119.528,03)	92,12
Belanja Modal Tanah	110.353.113.152,00	78.009.159.889,00	(32.343.953.263,00)	70,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.254.189.758.695,00	1.142.602.008.686,76	(111.587.750.008,24)	91,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.176.757.181.048,00	1.963.235.930.500,64	(213.521.250.547,36)	90,19
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.666.984.254.417,00	1.612.446.622.172,57	(54.537.632.244,43)	96,72
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.631.341.571,00	41.747.926.804,00	(1.883.414.767,00)	95,68
Belanja Modal Aset Lainnya	34.172.013.326,00	31.967.894.628,00	(2.204.118.698,00)	93,54
JUMLAH BELANJA MODAL	5.286.087.662.209,00	4.870.009.542.680,97	(416.078.119.528,03)	92,12
BELANJA TIDAK TERDUGA	65.587.429.511,00	64.230.807.314,00	(1.356.622.197,00)	97,93
Belanja Tidak Terduga	65.587.429.511,00	64.230.807.314,00	(1.356.622.197,00)	97,93
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	65.587.429.511,00	64.230.807.314,00	(1.356.622.197,00)	97,93
BELANJA TRANSFER	6.795.345.120.541,00	6.192.552.558.013,00	(602.792.562.528,00)	91,12
Belanja Bagi Hasil	4.992.900.000.000,00	4.391.448.912.082,00	(601.451.087.918,00)	87,95
Belanja Bantuan Keuangan	1.802.445.120.541,00	1.801.103.645.931,00	(1.341.474.610,00)	99,92
JUMLAH BELANJA TRANSFER	6.795.345.120.541,00	6.192.552.558.013,00	(602.792.562.528,00)	91,12
JUMLAH BELANJA	22.198.305.000.000,00	20.463.583.151.615,70	(1.734.721.848.384,28)	92,18
SURPLUS/DEFISIT	(976.554.771.199,00)	1.621.113.350.301,67	2.597.668.121.500,67	166,00
PEMBIAYAAN DAERAH	976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	(44.980.000,47)	99,99
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	(44.980.000,47)	99,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	(44.980.000,47)	99,99
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	(44.980.000,47)	99,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	976.554.771.199,00	976.509.791.198,53	(44.980.000,47)	99,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	2.597.623.141.500,20	2.597.623.141.500,20	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD





**LAMPIRAN I.1 : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

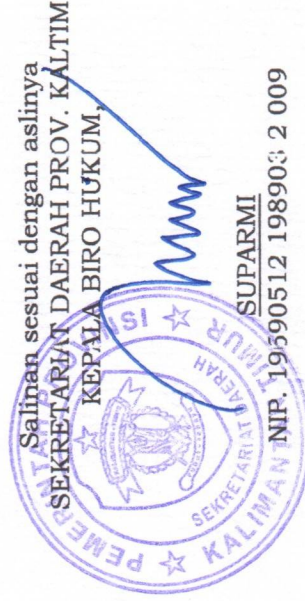
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1.01.2.22.0.00.01.0000	PENDAPATAN DAERAH	5.954.624.350,00	310.623.049.105,39	304.668.424.755,39	5216,50
1.01.2.22.0.00.01.0000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.954.624.350,00	8.665.436.551,39	2.710.812.201,39	145,52
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Daerah	5.000.524.350,00	8.340.176.302,25	3.339.651.952,25	166,78
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Jasa Usaha	5.000.524.350,00	8.340.176.302,25	3.339.651.952,25	166,78
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	690.060.000,00	1.133.357.000,00	443.297.000,00	164,24
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	690.060.000,00	1.133.357.000,00	443.297.000,00	164,24
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.002.200.000,00	1.608.070.000,00	605.870.000,00	160,45
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.002.200.000,00	1.608.070.000,00	605.870.000,00	160,45
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	31.000.000,00	45.521.000,00	14.521.000,00	146,84
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	31.000.000,00	45.521.000,00	14.521.000,00	146,84
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	307.100.000,00	452.170.070,00	145.070.070,00	147,23
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	307.100.000,00	452.170.070,00	145.070.070,00	147,23
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.198.056.850,00	4.469.024.232,25	2.270.967.382,25	203,31
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.198.056.850,00	4.469.024.232,25	2.270.967.382,25	203,31
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	772.107.500,00	632.034.000,00	(140.073.500,00)	81,85
1.01.2.22.0.00.01.0000	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	772.107.500,00	632.034.000,00	(140.073.500,00)	81,85
1.01.2.22.0.00.01.0000	Lain-lain PAD yang Sah	954.100.000,00	325.260.249,14	(628.839.750,86)	34,09
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	323.509.798,00	323.509.798,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	323.509.798,00	323.509.798,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	323.509.798,00	323.509.798,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan BLUD	954.100.000,00	1.615.451,14	(952.484.548,86)	0,16
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	858.100.000,00	1.615.451,14	(856.484.548,86)	0,18
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	1.615.451,14	1.615.451,14	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	858.100.000,00	0,00	(858.100.000,00)	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	301.957.612.554,00	301.957.612.554,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	J/JMLAH (Rp)		DASAR HUKUM	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	156.377.100,00	87.235.000,00	(69.142.100,00)	55,78
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Ases Tidak Berwujud Lainnya	69.196.000,00	0,00	(69.196.000,00)	0,00
8.01.01.00.00.02.0000	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	154.046.240,00	100.340.000,00	(53.706.240,00)	65,13
8.01.01.00.00.02.0000	BELANJA OPERASI	114.540.000,00	61.740.000,00	(52.800.000,00)	53,90
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Barang dan Jasa	114.540.000,00	61.740.000,00	(52.800.000,00)	53,90
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Barang	85.300.000,00	61.740.000,00	(23.560.000,00)	72,37
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Barang Pakai Habis	85.300.000,00	61.740.000,00	(23.560.000,00)	72,37
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	85.300.000,00	61.740.000,00	(23.560.000,00)	72,37
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Pemeliharaan	29.240.000,00	0,00	(29.240.000,00)	0,00
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.240.000,00	0,00	(29.240.000,00)	0,00
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempit Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.240.000,00	0,00	(29.240.000,00)	0,00
8.01.01.00.00.02.0000	BELANJA MODAL	39.506.240,00	38.600.000,00	(906.240,00)	97,70
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.506.240,00	38.600.000,00	(906.240,00)	97,70
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.506.240,00	38.600.000,00	(906.240,00)	97,70
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.506.240,00	38.600.000,00	(906.240,00)	97,70
8.01.01.00.00.02.0000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.506.240,00	38.600.000,00	(906.240,00)	97,70
	JUMLAH BELANJA	473.961.397.958,00	460.955.419.921,00	(13.005.978.035,00)	97,25
	SURPLUS DEFISIT	(473.961.397.958,00)	(460.955.419.923,00)	13.005.978.035,00	97,25

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,
 SUPARMI
 NIP. 19590512 198903 2 009